



PENGUATAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFECTIVE PRACTICES
FOR CURRICULUM REFORM IN ASIA

UN SMA/MA DAN SMK TAHUN 2017

LAPORAN KUNJUNGAN STUDI DI FILIPINA
(BAGIAN 1)

DAFTAR ISI

- 3 LAPORAN KUNJUNGAN STUDI DI FILIPINA (Bag. 1)
- 9 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFECTIVE PRACTICES FOR CURRICULUM REFORM IN ASIA
- 11 CATATAN DARI SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 14 UN SMA/MA DAN SMK TAHUN 2017
- 16 PELAKSANAAN UNBK DI KOTA MALANG
- 19 PENILAIAN BUKU KELAS V SD
- 22 TELAAH DRAF STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
- 24 PENGUATAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
- 26 LENSE BSNP

Penanggungjawab
Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, M.S.

Pemimpin Redaksi
Bambang Suryadi, Ph.D.

Redaksi Eksekutif
Dr. Ir. Kiki Yulianti, M.Sc.
Dr. Nanang Arit Guntoro, M.Si.
Prof. Dr. Zaki Su'ud, M.Eng.
Dr. Khomsiyah, MM, Ak.

Redaksi Pelaksana
Dr. Teuku Ramli Zakaria, M.A.



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada edisi kedua ini, Buletin BSNP menyajikan dua berita utama, yaitu reformasi kurikulum dan pelaksanaan Ujian Nasional 2017. Reformasi kurikulum dikemas dalam beberapa ulasan, diantaranya adalah laporan kunjungan studi ke Departemen Pendidikan Pilipina dan catatan penyelenggaraan konferensi internasional dan nasional tentang reformasi kurikulum. Topik ini dibahas dalam perspektif implementasi pendidikan berbasis standar. Topik kedua adalah laporan tentang kesuksesan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang telah berhasil mendongkrak indeks integritas bagi siswa dan satuan pendidikan. Berita lain tentang kegiatan BSNP juga kami sajikan dalam edisi ini, diantaranya adalah penilaian buku teks pelajaran dan kegiatan pengembangan standar nasional pendidikan. Lensa BSNP dalam bentuk foto, juga kami sajikan untuk melengkapi edisi ini.

Sebagai penutup, atas nama pengelola Buletin BSNP kami mengucapkan Selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1438 H. Mohon Maaf Lahir dan Batin. Selamat membaca.

REDAKSI

Gambar Sampul: Pembukaan International Conference on Effective Practices of Curriculum Reform in Asia, tanggal 12 Mei 2017 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Konferensi ini dilaksanakan oleh Balitbang dan bekerjasama dengan ACPD dan ACER serta diikuti 300 peserta dari pemangku kepentingan pendidikan.

Penyunting/Editor
dr. Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, M.Ed. Ph.D.
Prof. Ir. Zainal Arifin Hasibuan, Ph.D.
Prof. Dr. Ipung Yuwono, M.Sc.
Ir. Djoko Lukmanto, M.Sc., Ph.D.

Desain Grafis & Fotografer
Arief Rifai Dwiyanto, ST
Ibar Warsita
Fiqih Trihandi

Sekretaris Redaksi
Ning Kamingsih
Nurul Najmah

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2, Mendikdasmen, Jl. RS.
Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

Email: info@bsnp-indonesia.org Telp. (021) 7668590

Website: <http://www.bsnp-indonesia.org> Fax. (021) 7668591

LAPORAN KUNJUNGAN STUDI DI FILIPINA

KURIKULUM, PENILAIAN, DAN PERBUKUAN (BAGIAN PERTAMA)

Bambang Suryadi dan Tim

Mulai edisi kedua ini, Buletin BSNP menyajikan laporan kunjungan studi di Filipina yang dilakukan pada tanggal 10-11 April 2017. Kunjungan studi ini diikuti oleh delapan orang dari ACER, Puskurbuk, dan BSNP. Semoga bermanfaat.



Bagian depan gedung Departemen Pendidikan Filipina.

Pendahuluan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Australian Council for Educational Research (ACER) di bawah naungan Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) melakukan kunjungan studi ke Departemen Pendidikan Filipina pada tanggal 10-11 April 2017. Tujuan kunjungan studi ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang sistem pendidikan di Pilipina, khususnya yang berkaitan dengan kurikulum, penilaian, buku

teks pelajaran, dan pelatihan guru. Target kunjungan studi adalah Departemen Pendidikan Filipina. Selain itu, dilakukan juga kunjungan ke Divisi Pendidikan Kota Mandaluyong, Highway Hills Integrated School dan Mandaluyong High School.

Peserta kunjungan studi terdiri atas delapan orang, yaitu Scott Paris ACER Team Leader, Miranti Putri Aisyah staf ACER Perwakilan Jakarta, Supriyatno, Suprananto, Lambas, Wuri Prihantini, Andi Muhammad

Yusri Saad dan Bambang Suryadi. Mereka mewakili Pusat Kurikulum dan Perbukuan (PUSKURBUK) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Saat ini ACDP sedang memberikan dukungan kepada Pusat Perbukuan dan Kurikulum, Balitbang melalui program ACDP51-Curriculum Reform. Melalui kunjungan studi ini diharapkan ada *lesson learned* dan *good practices* di Filipina terkait dengan kurikulum, perbukuan, dan penilain yang dapat diterapkan

di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selain kunjungan studi ke Filipina, beberapa bulan yang lalu juga telah dilakukan kunjungan studi ke Singapura dengan peserta yang berbeda.

Laporan ini ditulis sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan kunjungan studi tersebut. Kami menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan.

Last but not least, penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tidak terhingga kepada Ketua BSNP, Kepala Balitbang, *Project Leader* ACDP-ACER dan pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut serta dalam kegiatan ini.

A. Visi dan Misi Pendidikan

Sebelum mengenal lebih lanjut tentang sistem pendidikan di Filipina khususnya yang terkait dengan kurikulum, penilaian, dan perbukuan, kita perlu mengenal visi, misi, dan nilai-nilai moral yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan.

Visi:

We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potentials and contribute meaningfully to building the nation.

As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders.

Misi:

1. *To protect and to promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where.*
2. *Students learn in a child-friendly, gender sensitive, safe, and motivating environment.*
3. *Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner*
4. *Administrators and staff and stewards of the institution ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen.*
5. *Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing life-long learners.*

Core values:

Maka-diyos (saleh)

Makatao (kemanusiaan)

Makakalikasan (peduli lingkungan)

Makabansa (nasionalis)

Visi, misi, dan nilai-nilai utama tersebut ditulis di berbagai tempat strategis, baik di lingkungan Departemen Pendidikan maupun di lingkungan sekolah. Selain itu, ada wisdom kearifan yang menjadi moto atau prinsip kerja, yaitu *'Honesty is the best policy.'* Hal ini menunjukkan bahwa proses penanaman nilai-nilai moral tersebut dilakukan, salah satunya, melalui penciptaan lingkungan yang mendidik (*nurturing environment* atau *al-biah at-tarbawiyah*).



Visi, misi, dan core values pendidikan Filipina yang ditempel di salah satu dinding sekolah.

Pengelolaan pendidikan nasional di Filipina dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dasar (*basic education*) yaitu K-12 dan pendidikan tinggi (*higher education*). Departemen Pendidikan (Department of Education—DePed) mengelola pendidikan dasar, sedangkan pendidikan tinggi dikelola oleh Commission on Higher Education (CHED) and Technical Education and Skills Development Authority (TESDA). CHED mengurus pendidikan tinggi (universitas atau *College*), sedangkan TESDA mengurus pendidikan teknik dan vokasi (*technical and vocational education*). DePed dipimpin oleh seorang *Secretary* (setingkat Menteri) dan CHED dipimpin oleh seorang *Commissioner* (setingkat Menteri).

Terkait dengan sistem pendidikan di Philipina, setelah implementasi K-12, sistem pendidikan berubah dari 10 tahun menjadi 12 tahun dengan pembagian tingkatan/grade sebagai berikut:

Grade I : K – 3 Years (Kinder, Elementary) Compulsory
Grade II : 4 – 6 Years (Elementary) Compulsory
Grade III : 7 – 10 Years

(Junior High School) Compulsory
Grade IV : 11 – 12 Years (Senior High School) Compulsory

Fokus kunjungan studi tim ini adalah Departemen Pendidikan (DePed). Selain itu, tim juga mengunjungi Divisi Pendidikan Kota Mandaluyong dan dua sekolah yaitu Highway Hills Integrated School dan Mandaluyong High School. Selanjutnya, akan kami sampaikan beberapa catatan penting dari hasil kunjungan studi yang meliputi reformasi pendidikan, gerakan literasi, kurikulum, penilaian, perbukuan, dan sumber belajar.

B. Reformasi Pendidikan: Standard Based Education

Pada tahun 2013 Filipina melakukan reformasi pendidikan dengan menerapkan pendidikan berbasis standar. Selain itu, mereka juga memperluas cakupan pendidikan dasar (*basic education*) dari kelas/grade 10 menjadi kelas 12 (K-10 to K-12). Sebelum tahun 2013, Taman Kanan-kanak (*Kindergarten*) tidak masuk dalam pendidikan dasar. Wajib belajar hanya sampai kelas 10.

Filipina menerapkan pendidikan berbasis standar melalui kebijakan *curriculum framework and standard development*. Pengembangan standar menjadi tanggung jawab dan kewenangan masing-masing biro (semacam direktorat) di lingkungan Departemen Pendidikan Filipina. Hal ini berbeda dengan penerapan pendidikan berbasis standar di Indonesia, di mana kewenangan pengembangan standar ada di BSNP. Lingkup standar nasional pendidikan di Filipina meliputi enam aspek sebagai berikut:

1. Content
2. Content standard
3. Performance standard
4. Learning competence
5. Code
6. Learning materials

Content	Content Standard	Performance Standard	Learning Competencies	Code	Learning Materials
	The learner...	The learner...	The learner...		
Grade 1-First Quarter					
Numbers and number sense	Demonstrates understanding of whole numbers up to 100, ordinal numbers up to 10 th , money up to PhP100 and fractions $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{4}$	1. Is able to recognize, and order whole numbers up to 100 and money up to PhP100 in various forms and contexts. 2. Is able to recognize, and represent ordinal numbers up to 10th, in various forms and contexts.	1. Visualizes and represents numbers from 0 to 100 using a variety of materials. 2. Counts the number of objects in a given set by ones and tens.	M1NS-Ia-1.1 M1NS-Ib-2.1	1. BEAM LG. Gr. 1 Module 2-Sets of whole numbers 2. Lesson guide in Elem. Math Grade 1. P. 70 3. Lesson Guide in Elementary Mathematics Grade 1. 2012, p. 70-76, 84-87.

*Tabel 1.
Contoh
Format
Curriculum
Framework
and
Standard
Development*

Keenam aspek tersebut dibuat menjadi satu format sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Contoh standar secara lengkap dapat diakses di laman: <http://lrmds.deped.gov.ph>.

Mencermati format standar sebagaimana dijelaskan di atas, dapat kita pahami bahwa rumusan standar tersebut sangat jelas (*well-articulated*) dan terukur (*measurable*).

Selain itu, dapat dipahami juga bahwa Filipina menerapkan *content based standard*, meskipun pada dasarnya juga ada *competence based standard*. Dalam hal ini, ada perbedaan dibandingkan dengan penerapan *standard based education* di Indonesia, yaitu adanya empat standar yang menjadi acuan pengembangan kurikulum yang meliputi SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

Berdasarkan standar kurikulum tersebut, Biro

Penilaian Pendidikan di Departemen Pendidikan Filipina mengembangkan standar penilaian. Oleh karena itu, dapat disebutkan Philipina menerapkan curriculum based assessment atau curriculum driven assessment, bukan assessment based curriculum. Artinya, bentuk kurikulum yang ada menentukan sistem penilaian, bukan sebaliknya.

Selain itu, materi yang diajarkan oleh guru di sekolah untuk setiap minggu telah direncanakan di dalam standar kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan. Kewenangan yang diberikan kepada guru ada pada pemilihan bahan ajar. Hal ini berbeda dengan di Indonesia di mana lesson plan atau RPP menjadi kewenangan guru di masing-masing satuan pendidikan.

Kalender akademik dimulai pada bulan Juni dan berakhir pada bulan Maret. Waktu pembelajaran dalam setahun dibagi menjadi

tiga bagian yang masing-masing terdiri atas empat bulan (*quarter system*). Jumlah hari belajar dalam satu tahun tidak boleh melebihi 220 hari sekolah. Sekolah berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari pukul 07.00 s.d. 13.00.

Kurikulum dibuat berdasarkan penelitian selama 4 tahun yang dimulai pada tahun 2011. Penyusunan dokumen kurikulum selesai pada tahun 2013, setelah itu Departemen Pendidikan melakukan *capacity building* kepada guru dan sekarang melakukan penguatan sistem penilaian dengan fokus pada penilaian kelas.

C. Kurikulum dan Gerakan Literasi

Reformasi kurikulum di Filipina pada tahun 2013 ditandai dengan adanya gerakan literasi. Dalam gerakan literasi ini, bahasa ibu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk siswa kelas I sampai dengan kelas III SD. Pada empat bulan pertama, semua mata



Hari pertama kunjungan studi, berfoto bersama Dr. Rosalina J. Vilaneza Chief Teaching and Learning Division, Bureau of Learning Delivery (kiri), di lantai lima gedung Departemen Pendidikan (10/4/2017).

pelajaran diajarkan dalam bahasa ibu. Pada empat bulan kedua (*second quarter*), siswa SD mulai belajar bahasa Filipino dan Inggris, namun materi diajarkan secara lisan saja.

Sebelum reformasi kurikulum tahun 2013, bahasa pengantar di sekolah adalah Bahasa Filipino dan Bahasa Inggris. Pertanyaannya, mengapa pada kurikulum 2013 materi diajarkan dalam bahasa ibu? Bukankah ini sebuah kemunduran dalam sistem pendidikan di Philipina, sementara di negara lain, orang mulai mengajarkan bahasa nasional dan bahasa internasional (Inggris) sejak Taman Kanan-Kanak dan SD?

Menurut Dr. Rosalina J. Vilaneza Chief Teaching and Learning Division, Bureau of Learning Delivery ada dua alasan. Pertama, siswa kelas I SD lebih mudah memahami isi materi (*content*) dalam bahasa ibu dibandingkan dengan bahasa Filipino atau Inggris. Kedua, materi yang diajarkan dalam bahasa ibu memiliki akurasi yang lebih tinggi

dibandingkan dengan materi yang diajarkan dengan bahasa Filipino atau Inggris. Dengan pengertian lain, proses pembelajaran dengan menggunakan bahasa Filipino dan Inggris untuk siswa kelas I-III SD ternyata kurang efektif. Interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa pun menjadi tidak optimal.

Dalam kajiannya, Dr. Rosalina J. Vilaneza yang gigih memperjuangkan perlunya diajarkan bahasa ibu pada siswa SD, menemukan bahwa ketika guru mengajar murid kelas I SD dengan bahasa Filipino, banyak siswa yang diam, tidak mau berbicara atau berpartisipasi di kelas. Mereka nampak pasif, bahkan bingung dengan apa yang diucapkan oleh guru. Tetapi ketika materi diajarkan dengan bahasa ibu, mereka sangat aktif, komunikatif, senang, dan cepat menangkap pesan yang disampaikan guru. Di samping itu juga, ada prinsip yang harus diakomodir oleh pendidikan, yaitu pendidikan untuk semua orang, termasuk di kota dan di pedalaman.

Lebih lanjut Dr. Rosalina mengatakan bahwa Philipina dengan penduduk 120 juta jiwa memiliki 187 bahasa ibu. Dari jumlah tersebut hanya 19 bahasa ibu yang diajarkan di sekolah, sebab 19 bahasa ibu itu telah mewakili sekitar 90 persen dari keseluruhan bahasa ibu. Konsekuensinya, buku teks pelajaran siswa untuk kelas I-III juga ditulis dalam 19 bahasa ibu, sesuai dengan daerah masing-masing. Buku teks pelajaran disediakan oleh penerbit swasta, setelah isinya mendapat persetujuan dari Departemen Pendidikan.

Proses pembelajaran di kelas I-III SD dilakukan dengan tematik integratif. Sedangkan proses pembelajaran di kelas IV-VI SD dilakukan berbasis mata pelajaran. Pelajaran bahasa Filipino dan Bahasa Inggris mulai diajarkan secara formal (tulisan dan lisan) di kelas IV-VI SD. Dengan proses pembelajaran ini, menjadi salah satu faktor penting mengapa warga Philipina memiliki literasi bahasa Inggris yang baik. Selain itu, pemerintah mengedukasi

masyarakat dengan membiasakan penggunaan Bahasa Inggris dalam bentuk papan pengumuman, nama jalan, petunjuk arah, dan sebagian besar iklan yang dipajang di tempat-tempat umum.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa siswa TK tidak dituntut untuk bisa membaca, menulis, dan menghitung (Calistung). Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia. Meskipun sudah ada edaran dari Dirjen PAUD dan DIKMAS supaya siswa TK tidak diajarkan Calistung, sebagian guru TK masih mengajarkan Calistung di TK. Bahkan sebagian besar orang tua merasa kurang percaya diri jika

anak mereka belum bisa Calistung di TK. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya ujian masuk SD dengan materi Calistung.

Guru kelas K-3, mengajar seluruh subjek yang diajarkan secara terintegrasi. Buku yang digunakan adalah buku teks dan *teacher manual*. Ketika guru mengajar *literacy* misalnya, di dalamnya ada materi matematika dan sains.

Mulai kelas 4-6, ada materi khusus yang berjumlah 9 materi, yaitu English, Filipino, matematika, sains, pendidikan moral, pendidikan jasmani dan olah raga, musik, dan *Araling Panlipunan* atau

AP (*Social Studies in English*). AP mencakup empat mata pelajaran yaitu ICT, *agriculture*, *home economic*, dan *fishery*.

Penerapan konsep kurikulum terintegrasi (*integrated curriculum*) pada sekolah dasar di Filipina, berbeda dengan penerapan di Indonesia. Di Indonesia, konsep tematik *integrative* diterapkan mulai dari kelas I-VI SD. Akan tetapi, mulai kelas IV-VI ada dua mata pelajaran yang diajarkan berbasis subject matter, yaitu matematika dan pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan (PJOK).



Berpose bersama nara sumber sambil memegang cinderamata sebagai tanda ikatan persaudaraan di Departemen Pendidikan (11/4/2017). Dari kiri ke kanan: Lambas, Suprananto, Supriyatno, Bambang Suryadi, Scott Paris, Rosalina J. Vilaneza, Andi Muhammad Yusri Saad, dan John Arnold Siene.

CURRICULUM IS THE WHOLE JOURNEY OF EDUCATION INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFECTIVE PRACTICES FOR CURRICULUM REFORM IN ASIA

Totok Suprayitno



Awaluddin Tjalla Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan memberikan sambutan dalam acara pembukaan International Conference on Effective Practices for Curriculum Reform in Asia (9/5/2017).

Demikian catatan penting dari International Conference on Effective Practices for Curriculum Reform in Asia yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerjasama dengan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACPD), Australian Council for Educational Research (ACER), dan INOVASI pada tanggal 9 Mei 2017 di Jakarta. Konferensi tersebut dihadiri 300 peserta dari Balitbang, Puspendik, Puskurbuk, perwakilan dari lembaga-lembaga di jajaran Kemdikbud, dan para guru di wilayah Jabodetabek. Selama konferensi, para pembicara memberikan perspektif global tentang pelaksanaan reformasi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian.

Dalam konferensi ini tiga pembicara tamu. Pertama adalah Dr. Dina Ocampo Wakil Menteri Pendidikan Pilipina yang menyampaikan materi tentang *Reforms and Transitions in Basic Education in the Philippines*. Kedua adalah Prof. Anita Rampal dari Delhi University India yang memaparkan makalah tentang *Curriculum Reform for Equity and Quality in India*. Ketiga adalah Prof. Jung-Duk Ohn dari Gyeongin National University of Education, Korea Selatan yang membawakan materi tentang

“ Kurikulum merupakan keseluruhan dari sebuah proses pendidikan, tidak hanya sekedar ketersediaan dokumen. Untuk menciptakan atmosfir sekolah yang bagus, implementasi kurikulum tidak hanya dibatasi di ruang kelas, buku teks pelajaran, dan ujian

Totok Suprayitno
Kepala Balitbang
Kemdikbud

Salah satu indikator pendidikan yang berkualitas di sebuah negara adalah adanya kurikulum, sistem penilaian, dan buku teks pelajaran yang berbasis standar. Sebaik apapun sebuah kurikulum dan system penilaian, kunci utama dalam implementasi di lapangan adalah guru. Negara Pilipina, India, dan Korea Selatan memiliki beberapa praktik baik yang bisa diterapkan di Indonesia dalam melakukan reformasi kurikulum dan sistem penilaian. Di tiga negara tersebut, misalnya, sama-sama ada ujian nasional, namun sifatnya tidak *high stake exam* karena tidak menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Ujian di ketiga negara tersebut masih dilaksanakan dengan cara berbasis kertas dan pensil (*paper and pencil based test*), tetapi di Indonesia, sejak tiga tahun terakhir telah menerapkan ujian nasional berbasis komputer (*computer based test*).

Major Features of the 2015 Revised National Curriculum in Korea and Issues of Implementation.

Selain dalam konferensi sehari ini, juga tampil beberapa panelis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Totok Suprayitno Kepala Balitbang, Hendarman Kepala Puslitjak, Nizam Kepala Puspendik, Awaluddin Tjalla Kepala Puskurbuk. Sedangkan pembicara dari ACPD adalah David Harding dan dari ACER adalah Scott Paris. Sebagai pemandau acara adalah Najelaa Shihab.

Menurut David Harding Penasehat Utama ACDP dalam sambutannya mengatakan bahwa masalah kurikulum merupakan perkara yang sangat luas dan berdampak besar terhadap kualitas pendidikan. Permasalahannya adalah bagaimana menerjemahkan konsep kurikulum ke dalam praktik dan proses pembelajaran di dalam kelas.

“Sebagai sebuah ide dan gagasan yang besar, reformasi kurikulum di Indonesia dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga dalam implementasi di lapangan masih ditemukan berbagai kendala”, ucapnya.

Bagi Scott Paris dari ACER, kurikulum di Indonesia sangat unik dan memiliki fondasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, reformasi kurikulum dan penilaian yang dilakukan di Indonesia merupakan peluang yang sangat bagus dan tanda-tanda kemajuan di masa mendatang. Oleh karena itu, pengalaman di negara lain, seperti Singapura bisa diterapkan di Indonesia.

“Reformasi kurikulum di Singapura dilakukan dengan sangat sistematis dengan memberikan perhatian yang sangat tinggi tentang nilai-nilai moral dan sikap”, ucap Scott Paris.

Sementara itu, berdasarkan pengalaman di Pilipina, Dina Ocampo menyoroti lemahnya minat orang untuk membaca dan menelaah dokumen yang terkait dengan kurikulum. “Orang ingin membuat kurikulum. Orang peduli kurikulum. Tetapi orang tidak mau membaca (dokumen) kurikulum”, ucapnya yang langsung disambut dengan aplaus dari para hadirin.

Bagi Totok Suprayitno masalah pendidikan di negara manapun tidak pernah selesai. Selalu ada persoalan pendidikan, sebagaimana yang terjadi di India, Pilipina, dan Korea Selatan. Oleh karena, cara kita belajar dari ketiga negara tersebut, bukan sekedar mengimpor praktik baik yang ada, tetapi perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia, sebab kurikulum adalah keseluruhan proses pendidikan.

“Kurikulum merupakan keseluruhan dari sebuah proses pendidikan, tidak hanya sekedar ketersediaan dokumen. Untuk menciptakan atmosfer sekolah yang bagus, implementasi kurikulum tidak hanya dibatasi di ruang kelas, buku teks pelajaran, dan ujian. Akan tetapi, kurikulum harus dilihat sebagai *the whole journey of education*”, ucap Totok.

Menurut Awalludin Tjalla Kepala Puskurbuk ada dua hal yang sangat penting dalam sebuah kurikulum, yaitu konseptualisasi dan implementasi. Kurikulum secara konseptual harus memiliki basis keilmuan yang jelas dan secara praksis harus bisa diterapkan oleh

guru-guru di lapangan.

“Mesti ada kesesuaian antara *intended curriculum dan implemented curriculum*”, ucap Awaluddin seraya menambahkan jika masih ada kesenjangan antara keduanya, artinya ada masalah yang perlu diselesaikan.

Dari perspektif penilaian, reformasi kurikulum sangat menentukan system penilaian. Dalam hal ini Nizam Kepala Puspendik berpandangan bahwa apapun kurikulumnya, yang penting ujiannya seperti apa. Artinya, kemampuan guru dalam melakukan penilaian kelas dan sekolah menjadi sangat penting. Menurut Nizam, salah satu kelemahan guru-guru di Indonesia adalah masih lemahnya kemampuan mereka dalam menyusun soal penilaian yang berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Totok Supriyatno: Sudahkah Pendidikan Kita Memerdekakan Anak?

CATATAN DARI SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Totok Supriyatno Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (23/5/2017) di Jakarta. Kepala Balitbang menyampaikan pesan untuk melatih anak didik dengan perbedaan gagasan, sebelum mereka diajari tentang perbedaan dan keragaman kebudayaan.

Tuntutan abad 21 tidak bisa dijalani dengan struktur kurikulum dan model pembelajaran lama. Reformasi penilaian dan kurikulum mesti dilakukan. Diantaranya adalah perubahan pedagogis, yaitu dari pembelajaran berpusat pada guru kepada pembelajaran berpusat pada murid dan dari pembelajaran berbasis isi atau materi kepada pembelajaran berbasis aktivitas. Keberhasilan implementasi sebuah kurikulum tidak bisa dilihat dari ketersediaan dokumen dan regulasi, tetapi lebih pada perubahan sikap

dan peningkatan kompetensi siswa. Oleh karena itu, reformasi penilaian dan kurikulum harus mampu memerdekakan peserta didik dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat abad 21 yang berwawasan internasional dengan ditandai adanya kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaborasi serta komunikasi yang baik.

Demikian catatan penting dari seminar nasional pendidikan dan kebudayaan yang diselenggarakan

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Mei 2017. Bertempat di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A Lantai 1 Komplek Kemdikbud, Jakarta, acara ini diikuti 210 peserta dari seluruh Indonesia. Mereka mewakili unsur guru, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas pendidikan, kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), pimpinan perguruan tinggi, praktisi pendidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Seminar yang mengusung tema "Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas: Pendidikan Sebagai Roda Penggerak Masyarakat Ekonomi Asean" ini dibuka oleh Totok Supriyatno Kepala Balitbang atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kepala Balitbang, seminar ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh ACDP, Uni Eropa, Asian Development Bank, dan Pemerintah Australia.

Acara dibagi menjadi tiga sesi dan masing-masing sesi memiliki tema khusus. Sesi pertama adalah *Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Peradaban Masa Lalu Sebagai Modal Identitas Bangsa Dalam Menghadapi Tantangan Global*. Nara sumber pada sesi pertama adalah Drs. I Made Geria, M.Si Kepala Pusat Arkeologi Nasional Balitbang, Prof. Ris. Dr. Bagyo Prasetyo ahli arkeologi prasejarah, Pusat Arkeologi Nasional, Veronique Degroot, Ph.D Kepala The Jakarta Center, EFEO, dan Mahandis Yoanata dari National Geographic Indonesia.

Sesi kedua adalah *Menyiapkan Guru dalam Menghantarkan Siswa Indonesia Menyongsong Tantangan Global Abad 21*. Pada sesi kedua ini, bertindak sebagai nara sumber adalah Nur Berlian Venus Ali, MSE, Dr Etty Sisdiana, Dr. Mahdiansyah, MA., dan Dra. Yenny Sukhriani, M.Ed. Tiga nara sumber pertama merupakan penelilti dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, sedangkan nama keempat adalah guru SMA Negeri 70 Jakarta sekaligus sebagai Ketua MGMP DKI Jakarta, Tampil sebagai nara

sumber ketiga adalah Prof Nizam Kepala Puspendik, Dr. Awaluddin Tjalla Kepala Puskurbuk, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Kepala Sekolah SD di Sulawesi Selatan. Topik pembahasan pada sesi ketiga adalah *Reformasi Kurikulum dan Penilaian untuk Membangun Kompetensi Abad 21*.

Pendidikan yang Memerdekakan

Totok Suprayitno, Kepala Balitbang dalam sambutannya menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Menurutnya, selama ini anak didik kita sering didekte dan disugahi dengan kebenaran mutlak yang datangnya dari guru.

"Anak didoktrin dengan jawaban yang disediakan oleh guru atau yang ada di dalam buku. Padahal, kemungkinan ada anak yang memiliki variasi jawaban, tetapi jika jawabannya tidak sesuai dengan pendapat guru, maka anak tersebut disalahkan", ucapnya seraya menambahkan pertanyaan ujian semestinya tidak hanya dalam bentuk pilihan ganda untuk mendorong peserta didik memberikan opsi jawaban yang bervariasi.

Lebin lanjut Totok melontarkan pertanyaan kepada para peserta seminar sebagai bahan renungan dan refleksi dalam menghadapi tantangan abad 21. Pertanyaan tersebut adalah: Apakah pendidikan kita sudah memerdekakan pemikiran anak? Bagaimana anak kita bisa berpikir kritis? Berpikir alternatif di

luar pilihan yang ada?

Jawaban terhadap pertanyaan ini, tambah Totok, sangat penting dan selama pendidikan kita masih membelenggu dengan tirani-tirani, sehabat apapun desain kurikulum kita, tidak akan menghasilkan tamatan yang berkualitas. Oleh karena itu, kewajiban para guru adalah melatih anak didik dengan perbedaan gagasan.

"Latih anak didik kita dengan perbedaan gagasan, sebelum mereka diajari tentang perbedaan dan keragaman kebudayaan. Kita boleh tidak setuju atau beda pendapat, tetapi kita tetap menghormati pendapat orang lain", ucapnya.

Reformasi Penilaian dan Kurikulum

Pada kesempatan tersebut, Totok juga menyampaikan perlunya dilakukan reformasi sistem penilaian. Selama ini, ucapnya, jika kita bicara penilaian yang diingat adalah Ujian Nasional (UN). Ketika sola UN masih dalam bentuk pilihan ganda, seolah-olah seluruh proses pembelajaran dan penilaian yang dilakukan guru juga mengarah kepada pilihan ganda. Bahkan menjelang UN, di sekolah tidak ada kegiatan kecuai mengajarkan kisi-kisi ujian dan latihan menjawab soal UN.

Menurut Totok sekarang ini tidak perlu lagi diperdebatkan UN itu perlu atau tidak. Sebab, meskipun tidak lagi menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, UN tetap diperlukan untuk mengecek pencapaian kompetensi siswa

dalam mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan.

"Saat ini kita lebih menekankan pentingnya penilaian di tingkat kelas dan sekolah. Oleh karena itu, hidupkan model penilaian yang memungkinkan anak berbeda pendapat. Berikan pertanyaan terbuka (open-ended question) dalam bentuk esai dan soal yang mendorong anak berpikir kritis", pesan Kabalitbang kepada para peserta seminar.

Terkait dengan reformasi kurikulum, Totok menegaskan bahwa semangat Kurikulum 2013 adalah untuk memberi ruang keaktifitas kepada para guru dalam melakukan proses pendidikan. "Dengan semangat untuk memberikan ruang kreativitas kepada para guru, maka tahun ini Kemdikbud tidak lagi memberikan pedoman mengajar dengan metode khusus, seperti metode 5M. Sebab mengajar adalah seni. Silakan berikan seni dan gairah mengajar. Silabus tidak wajib diikuti, sebab silabus itu sekedar contoh. Guru-guru harus mampu membuat silabus yang lebih kontekstual", pesan Totok.

Kendala Implementasi K-13

Tidak dinafikan dalam implementasi Kurikulum 2013 yang sudah masuk tahun kelima, masih terdapat berbagai kendala. Menurut Kepala Balitbang kendala yang dianggap penting adalah pola pikir para guru dan pengawas yang terpaksa dengan regulasi atau peraturan.

"Tidak kalah ramainya adalah pembahasan tentang regulasi kurikulum yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan. Para guru dan pengawas di lapangan, lebih sering berbeda pendapat tentang peraturan, daripada tentang kualitas pendidikan", ujarnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Totok mengajak para guru untuk melakukan pembaharuan dan berkreasi tanpa harus mempersoalkan regulasi. "Hal yang baik tidak usah menunggu regulasi (Permendikbud), tapi jalankan saja. Jangan sampai mau melakukan hal baik menunggu Permendikbud. Insya Allah tidak ada masalah. Jalankan saja", pesan Totok yang langsung disambut dengan tepuk tangan dari para peserta seminar.

Sementara itu, . Etty Sisidiana peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan menyampaikan bahwa salah satu kendala implementasi K-13 adalah kompetensi instruktur kabupaten (IK) yang masih rendah dalam memberikan pelatihan dan menyosialisasikan kurikulum 2013 kepada para guru. Tak jarang juga, IK kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga ketika ada pertanyaan dari guru, IK malah mengembalikan permasalahan tersebut kepada guru, tidak memberikan jawaban yang memuaskan.

Lebih lanjut Etty menyampaikan bahwa Puslitjak melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan guru yang dilakukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan. Fasilitas yang digunakan untuk pelatihan juga masih terbatas,

sehingga hasilnya kurang optimal. Sebagai contoh, pelatihan hanya dengan menggandakan materi yang disiapkan oleh direktorat terkait, tanpa ada pendalaman dan penajaman materi. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena pola rekrutmen IK yang kurang jelas kriteria dan acuannya. (BS)

UN SMA/MA DAN SMK TAHUN 2017

UNBK SUKSES, TINGKAT KEJUJURAN MENINGKAT



Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (berbaju putih) menyampaikan hasil UN SMA/MA dan SMK tahun 2017 dalam acara konferensi pers di Jakarta (12/5/2017). Pelaksanaan UNBK tahun ini sukses dan berhasil meningkatkan tingkat kejujuran siswa dalam ujian

Ujian Nasional (UN) untuk jenjang SMA/MA dan SMK telah dilaksanakan pada tanggal 3 April dan selesai pada tanggal 19 April 2017 untuk ujian susulan, kecuali ujian susulan di DKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017. Peserta UN tahun 2017 sebanyak 3.613.199 siswa dengan rincian, 1.312.023 siswa dari 12.501 SMK dan 2.301.176 siswa dari 20.512 SMA/MA. Pelaksanaan ujian dilakukan dengan dua moda, yaitu Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Menurut Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini Indonesia mengukir sejarah baru dalam penggunaan teknologi dalam ujian terstandar dengan terlaksananya ujian nasional berbasis komputer di 30.577 sekolah/madrasah/PKBM yang diikuti oleh 3.731.099 siswa

dan peserta kegiatan belajar mengajar.

“Untuk jenjang SMK, 1,176 juta siswa (90%) dilayani dengan komputer (UNBK), sementara pada jenjang SMA/MA 1,145 juta siswa (60%) dilayani dengan UNBK. Sisanya mengikuti ujian berbasis kertas dan pensil (UNKP). Peningkatan jumlah peserta UNBK dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 410%, sementara peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK mencapai 760%”, ucap Muhadjir.

Pada jenjang SMK, tambah Muhadjir, Provinsi Bangka-Belitung, DKI, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan telah 100% menggunakan UNBK. Sementara pada jenjang SMA/MA, Provinsi Bangka-Belitung, DKI, dan DIY telah 100% menggunakan UNBK. Pelaksanaan UN melibatkan tidak kurang dari 800.000 guru sebagai pengawas dan 300.000 proktor dari seluruh sekolah/madrasah yang mengikuti UN.

Lebih lanjut Muhadjir berharap tahun depan diharapkan 100% sudah melaksanakan UNBK. Bagaimana caranya? Selain memperluas prinsip resource sharing, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan memberikan bantuan kepada sekolah. Selanjutnya, Kementerian juga akan mengoptimalkan peran SMK.

“Kementerian akan melibatkan SMK yang memiliki Bidang Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan untuk mengadakan komputer. Dari segi kualitas mungkin belum optimal, tetapi dari segi biaya akan lebih murah”, ucap Muhadjir.

Sementara itu, Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar dan menengah mengatakan Kementerian terus akan

meningkatkan kerja sama, sehingga tidak semua bantuan dari Pusat, tetapi juga ada peran Pemerintah Daerah. Resource sharing bisa dilakukan pada jenjang yang sama, yaitu SMA dengan SMA/SMK atau sebaliknya, tetapi juga pada jenjang yang berbeda, yaitu SMP bisa menggunakan fasilitas milik SMA/SMK atau sebaliknya.

Perlu catatat bahwa Pelaksanaan UN tahun ini berjalan dengan sangat lancar dan relatif tidak banyak kendala/masalah. Laporan kebocoran soal dan kecurangan jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Gangguan teknis pelaksanaan UNBK seperti listrik padam, gangguan koneksi internet, kerusakan server/komputer di sekolah, semuanya dapat diatasi baik oleh tim teknis di Provinsi maupun oleh tim Posko UNBK Pusat. Banyak praktek baik yang dapat digali dari pelaksanaan UNBK, seperti berbagi sumber daya (resource sharing) antar sekolah, gotong royong untuk melaksanakan UNBK, maupun kerja sama positif antar para pihak dalam pelaksanaan UNBK. Kerjasama yang sangat kompak terjadi antara Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri, Kemkominfo, Lemsaneg, Perguruan Tinggi, BPPT, Dinas Pendidikan, Kanwil & Kantor Kemenag, LPMP, PLN, penyedia jaringan internet, kepala sekolah, pengawas, guru, komunitas TIK, siswa dalam mensukseskan UN, khususnya UNBK.

UNBK Meningkatkan Kejujuran

Muhadjir juga mengatakan bahwa perpindahan masif dari UNKP menjadi UNBK meningkatkan kejujuran/integritas pelaksanaan ujian, sehingga meningkatkan

kehandalan hasilnya.

“Pada jenjang SMA/MA, sekolah yang tahun lalu integritasnya tinggi atau sudah mengikuti UNBK, capaiannya meningkat 3,39 poin. Sementara sekolah yang tahun lalu mengikuti UNKP dengan diwarnai kecurangan (tingkat IIUN rendah) dan tahun ini mengikuti UNBK capaiannya mengalami penurunan/koreksi yang cukup signifikan”, jelasnya.

Hal senada, tambahnya, juga ditunjukkan oleh hasil sekolah UNKP. Sekolah UNKP ber-indeks-integritas UN tinggi yang berhasil mempertahankan integritasnya di tahun 2017, mengalami peningkatan nilai UN sebesar 1,8 poin. Sedangkan sekolah UNKP yang dulunya ber-indeks-integritas rendah namun tahun ini berhasil meningkatkan integritasnya dalam pelaksanaan UN (IIUN menjadi tinggi) nilai UN nya terkoreksi/ mengalami penurunan signifikan.

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa hasil menggembirakan juga ditunjukkan oleh provinsi-provinsi yang pada tahun-tahun sebelumnya memiliki IIUN tinggi kemudian di tahun 2017 seluruh sekolah di wilayahnya beralih moda tes menjadi UNBK. Nilai UN ketiga provinsi tersebut meningkat (Bangka Belitung 4,31 poin, DIY 4,2 poin, dan DKI Jakarta 2,07 poin). Sebaliknya provinsi yang di tahun 2016 rendah integritasnya, ketika beralih ke UNBK menunjukkan penurunan nilai. Hasil tersebut menjadi indikator bahwa UNBK adalah moda pengadministrasian tes yang lebih menjamin integritas pelaksanaan dan memberi gambaran capaian yang sesungguhnya.

Kenaikan nilai UN yang menggembirakan juga ditunjukkan pada capaian nilai mata pelajaran pilihan. Kebijakan mata pelajaran pilihan memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran yang paling disukainya. Dampak pemilihan berdasar kesukaan tersebut terlihat dari peningkatan nilai mata pelajaran pilihan. Nilai kimia pada sekolah penyelenggara UNBK meningkat 9,04 poin, nilai ekonomi meningkat 9,70 poin, dan nilai sosiologi meningkat 12,92 poin.

Di balik kabar baik tentang peningkatan integritas dan peningkatan nilai UN murni, yang paling penting dari hasil UN adalah tindak lanjutnya. Data dan peta capaian yang rinci dan handal telah diperoleh, baik dari hasil UNBK maupun UNKP yang meningkat IIUNnya, hendaknya hasil tersebut dapat dijadikan dasar perencanaan dan intervensi yang tepat untuk menata langkah perbaikan. Hasil perbaikan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah melalui pelatihan guru-guru dari sekolah dengan capaian rendah menunjukkan hasil perbaikan capaian yang signifikan di tahun berikutnya. Pemanfaatan di tingkat sekolah juga dapat dilakukan dengan mendiagnosa kesalahan yang dilakukan siswa pada butir-butir soal dengan capaian rendah. Sehingga UN sebagai alat evaluasi pembelajaran dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

PELAKSANAAN UNBK DI KOTA MALANG

PRAKTIK BAIK DAN UJIAN SEBAGAI INSTRUMEN PENANAMAN KARAKTER



Suasana di SMPN 1 Kota Malang selama ujian nasional berlangsung sangat kondusif. Ujian dilaksanakan dengan moda Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), diikuti 250 peserta yang dibagi dalam tiga sesi setiap hari.

Selasa (2/5/2017), hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk jenjang SMP/MTs di Kota Malang berjalan dengan lancar dan sukses, tanpa ada kendala. Proses sinkronisasi antara server pusat dan server lokal berhasil dilaksanakan pada H-3. Demikian juga proses pengunduhan token dan password bagi peserta sukses dilakukan. Pasokan daya listrik juga tidak ada kendala apapun. Dengan demikian, panitia pelaksana dan peserta merasa puas dengan pelaksanaan UNBK kali ini.

Demikian catatan penting dari hasil pemantauan pelaksanaan UNBK di SMPN 1, MTsN 1, SMPN 13 dan SMPN 15 kota Malang oleh anggota BSNP. Pada tahun ini, mayoritas SMP/MTs di Kota Malang melaksanakan UNBK, kecuali dua SMP dan enam MTs swasta.

“Dinas Pendidikan Kota Malang sudah mendorong seluruh satuan pendidikan melaksanakan UNBK. Namun masih ada dua SMP dan enam MTs yang belum bisa

melaksanakan UNBK karena faktor infrastruktur”, ucap Lili Ernawati Kepala SMPN 1 Kota Malang seraya menambahkan UNBK di sekolah ini diikuti 250 peserta yang dibagi dalam tiga ruangan dan tiga sesi sehari.

Di sekolah pemenang lomba Green School tahun 2016, anggota BSNP menemukan beberapa praktik baik yang bisa dijadikan model bagi sekolah lain dalam melaksanakan UNBK. Diantaranya adalah dengan menyediakan gen set, menyediakan satu ruang komputer cadangan, memasang CCTV, dan menjadi ujian sebagai instrumen penanaman karakter kepada siswa.

Didorong niat yang tulus untuk menyukseskan UNBK, Lili menyediakan satu set gen set dan satu ruang ujian cadangan yang dilengkapi dengan puluhan set komputer. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di sekolah lain yang hanya menyiapkan satu komputer cadangan di setiap ruang ujian.

Ketika dikonfirmasi kepada Denny Nugraha proktor SMPN 1, alasan diadakannya ruang cadangan tersebut untuk mengantisipasi jika terjadi masalah dengan komputer.

“Ibu Kepala Sekolah tidak ingin ada masalah dalam pelaksanaan UNBK, sehingga dari awal sudah diantisipasi dengan menyediakan satu ruang cadangan yang dilengkapi puluhan set komputer. Hal ini hanya ada di SMPN 1 Kota Malang saja”, ucap Denny Nugraha proktor UNBK.

Selain itu, untuk pemantauan pelaksanaan ujian, SMPN 1 Kota Malang menggunakan CCTV yang dikendalikan dari ruang kepala sekolah. Dengan demikian, seluruh aktivitas pengawas, proktor, dan peserta ujian dapat dipantau.

Sehubungan dengan pelaksanaan ujian yang dibagi menjadi tiga sesi, lebih lanjut Lili mengatakan bahwa sebelum memulai ujian untuk masing-masing sesi, peserta melakukan doa

bersama di ruang mushalla sekolah. Peserta sesi pertama, menunaikan shalat dhuha bersama sebelum ujian. Sedangkan peserta sesi kedua, menunaikan shalat dhuhur berjamaah setelah menunaikan ujian. Demikian juga peserta sesi ketiga, menunaikan shalat ashar berjamaah setelah selesai ujian pada pukul 16.00.

“Kami ingin menanamkan nilai-nilai moral, karakter, dan sikap spiritual melalui UNBK. Sebab ujian ini bukan hanya sekedar untuk mengukur kompetensi siswa, tetapi juga sebagai instrumen untuk pembentukan karakter”, ucap Lili.

Madrasah Sediakan Air Minum

Sementara itu, praktik baik yang penulis temukan di MTsN 1 Kota Malang adalah kebijakan pihak madrasah untuk menyediakan air minum bagi setiap peserta ujian selama ujian berlangsung. Ketika memasuki ruangan, peserta diberi air mineral dalam kemasan dengan ukuram 600 ml. Air tersebut diletakkan di bawah meja komputer masing-masing peserta. Jika haus, mereka bisa meminumnya, tanpa mengganggu proses ujian.

Menurut Syamsuddin Kepala MTsN 1 Kota Malang, penyediaan air minum tersebut dimaksudkan supaya peserta ujian tetap tercukupi kebutuhan energi dan nutrisinya selama dua jam berada di dalam ruang ujian.

“Mereka duduk selama dua jam di depan komputer, tentu memerlukan energi supaya dapat mengikuti ujian dengan tenang”, ucap Kepala MTs seraya menjelaskan praktik baik tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2016.



Siswa MTsN 1 Kota Malang mengikuti UNBK pada hari pertama ujian (2/5/2017) dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pihak madrasah menyediakan air minum supaya peserta ujian tetap tercukupi kebutuhan energi dan nutrisinya selama dua jam berada di dalam ruang ujian. Sebuah praktik baik yang bisa diadaptasi di sekolah/madrasah lain.

Ketika penulis menanyakan hal tersebut kepada Umargiono Sekretaris UNBK, dengan diplomatis ia menjawab, “ibarat tanaman, akan tetap segar jika kebutuhan airnya terpenuhi, tetapi sebaliknya tanaman akan layu jika kekurangan air”.

UNBK di MTs unggulan ini diikuti oleh 278 siswa yang dibagi dalam tiga ruang ujian dengan jumlah komputer 106. Semua ruangan dilengkapi dengan alat pendingin udara, berkarpet dan tertata dengan rapi. Sepatu peserta ditanggalkan dan disusun dengan rapi di rak yang disediakan di depan kelas. Dengan demikian, anak-anak merasa nyaman dan tenang selama melaksanakan ujian.

SMKN 2 Dukong Penuh UNBK SMP

Kesuksesan pelaksanaan UNBK SMP di Kota Malang tidak bisa dilepaskan dari dukungan dan kontribusi dari penerapan prinsip resource sharing (berbagi sumber) yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Pinrisp berbagi sumber

ini diterapkan oleh SMKN 2 Kota Malang dengan menerima dua sekolah yaitu SMPN 13 dan SMPN 15 untuk melaksanakan UNBK di sekolah kejuruan tersebut, dengan jumlah peserta untuk masing-masing sekolah sebanyak 288 dan 285 siswa.

Menurut Bagus Gunawan Kepala SMKN 2 Kota Malang, fasilitas yang dimiliki sekolahnya akan bermanfaat jika bisa digunakan oleh banyak pihak, termasuk siswa SMP.

“Saya merasa bersyukur jika fasilitas yang ada di sekolah ini dimanfaatkan banyak pihak, termasuk siswa SMP yang ikut UNBK di sini. Sebab semakin banyak pihak yang menggunakan fasilitas sekolah (SMKN 2), semakin optimal fungsi fasilitas yang ada. Lebih baik rusak karena digunakan daripada rusak sebelum digunakan”, ucapnya dengan penuh semangat ketika menerima penulis di ruang panitia ujian.



Dari kiri ke kanan, Agus Wahyudi Kepala SMPN 15, Bagus Gunawan Kepala SMKN 2 Kota Malang, Bambang Suryadi Anggota BSNP, dan Muhammad Syahroni Kepala SMPN 13 Malang. Siswa SMPN 13 dan SMPN 15 Kota Malang pada tahun 2017 ini masih menginduk ke SMKN 2 dalam pelaksanaan UNBK karena keterbatasan fasilitas komputer.

Bagi Muhammad Syahroni Kepala SMPN 13 dan Agus Wahyudi Kepala SMPN 15, dukungan yang diberikan SMKN 2 sangat membantu pihak sekolah dalam melaksanakan ujian. Para siswa pun merasa nyaman mengikuti ujian di SMK. Bahkan diantara mereka ada yang berkeinginan melanjutkan studi ke SMK setelah melihat fasilitas dan prestasi yang dicapai SMKN 2 tersebut.

Beberapa praktik baik dalam

pelaksanaan UNBK di Kota Malang bisa dijadikan model untuk diterapkan di tempat lain. Penerapan prinsip berbagi sumber, misalnya, jika sepenuhnya diterapkan, pelaksanaan UNBK tahun depan bisa mencapai seratus persen. Semoga. Amin. (BS)

“ Saya merasa bersyukur jika fasilitas yang ada di sekolah ini dimanfaatkan banyak pihak, termasuk siswa SMP yang ikut UNBK di sini. Sebab semakin banyak pihak yang menggunakan fasilitas sekolah (SMKN 2), semakin optimal fungsi fasilitas yang ada. Lebih baik rusak karena digunakan daripada rusak sebelum digunakan.

Bagus Gunawan Kepala SMKN 2 Kota Malang

PENILAIAN BUKU KELAS V SD

MELIBATKAN 121 ORANG PENILAI, 48 BUKU MATEMATIKA, DAN 35 BUKU PJOK

BSNP bersama Puskurbuk melakukan penilaian buku teks pelajaran untuk mata pelajaran Matematika dan Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan untuk Kelas V SD/MI dari tanggal 18-20 Mei 2017 di Bekasi. Kegiatan ini melibatkan 121 orang tim penilai, 48 pasang buku Matematika, dan 35 pasang buku PJOK. Setiap pasang buku terdiri atas buku siswa dan buku guru.

Terkait dengan pentingnya buku teks pelajaran, Zaki Su'ud anggota BSNP sekaligus sebagai coordinator kegiatan, dalam paparannya menyampaikan tiga hal penting. Pertama, buku sebagai sumber informasi/pengetahuan. Kedua, buku sebagai acuan bersama guru, murid dan stakeholder pendidikan lainnya. Ketiga, buku sebagai penunjuk arah capaian-capaian besar yang diinginkan standar/kurikulum pendidikan

“Buku guru dan siswa dalam jenjang SD sangat strategis dalam membangun fondasi karakter dan kualitas SDM Bangsa. Oleh karena itu, tim penilai perlu menelaah secara rinci. Minimal setiap penulis perlu membaca dua kali secara detail untuk setiap judul buku. Hal ini untuk memastikan tidak ada kesalahan konsep dan hal-hal yang berpotensi memicu kontroversi”, ucap Zaki seraya menambahkan penilaian buku difokuskan pada empat komponen utama, yaitu komponen isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan.

Menurut Syamsunnisa tim teknis dari Puskurbuk, ada 50 pasang buku matematika (buku siswa dan buku guru) dan 40 pasang buku PJOK yang didaftarkan oleh 52 penerbit. Setelah dilakukan penilaian awal dengan mempertimbangkan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), dari 50 matematika tersebut ada dua pasang yang tidak

lolos, sedangkan dari 40 buku PJOK ada 5 pasang yang tidak lolos.

“Dengan demikian ada 48 pasang buku matematika dan 35 pasang buku PJOK yang diikutkan dalam penilaian di Bekasi, mulai tanggal 18-20 Mei 2017”, ucapnya.

Dari tim penilai, tambah Syamsunnisa, untuk buku matematika melibatkan 64 orang penilai dengan rincian 16 orang dari ilmu murni, 16 orang lagi dari ahli pembelajaran dan 32 orang guru yang berpengalaman. Sedangkan untuk penilaian buku PJOK melibatkan 48 penilai dengan perincian 12 orang ahli ilmu murni, 12 orang lagi ahli pembelajaran, dan 24 guru berpengalaman. Selain itu, penilaian ini juga melibatkan 9 orang dari ahli grafika.

Tim penilai ahli bidang ilmu murni berasal dari beberapa perguruan tinggi, diantaranya adalah UNDIP, UNPAD, dan UNAND. Sedangkan



Penilaian buku Matematika dan PJOK kelas V SD/MI di Bekasi (18-20/5/2017). Setiap tim penilai menilai tiga pasang buku (buku siswa dan buku guru). Penilaian dilakukan dari aspek isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan.

tim penilai ahli pembelajaran berasal dari LPTK, diantaranya adalah UPI, UNNES, UNY, dan UM.

Buku ini ditargetkan akan digunakan di sekolah pada tahun pelajaran baru, yaitu pada bulan Juli 2017. Sementara untuk buku kelas VI, pendaftaran akan dimulai pada tanggal 10-12 Juli 2017 dan penilaian akan dilakukan pada akhir Juli.

Perbaikan Mekanisme Penilaian

Pada hari pertama penilaian, anggota BSNP dan Kepala Puskurbuk memanfaatkan waktu untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap mekanisme dan prosedur penilaian buku yang selama ini dilakukan.

Menurut Awaluddin Tjalla Kepala Puskurbuk, Kepala Balitbang memberikan pandangan supaya empat komponen penilaian buku kelas VI SD tidak dilakukan secara serentak seperti penilaian buku kelas V SD, tetapi penilaian dilakukan dari komponen yang terpenting, misalnya komponen isi. Buku yang lolos penilaian komponen utama tersebut akan diikutkan dalam tahap penilaian berikutnya, yakni penilaian komponen bahasa, penyajian, dan kegrafikaan.

Lebih lanjut, tambah Awaluddin, Kepala Balitbang juga menekankan pentingnya penilaian kualitatif. "Penilaian buku tidak hanya dengan memberikan angka (kuantitatif), tetapi ada penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing buku", ucapnya menirukan pesan Kepala Balitbang. Selain itu, penyediaan buku perlu melibatkan MGMP. Dengan cara tersebut, diharapkan buku yang lolos penilaian

telah memenuhi kriteria yang baik sesuai Permendikbud 8/2016.

Menanggapi usulan tersebut, anggota BSNP berpandangan perlu disepakati, apakah penilaian pada komponen utama tersebut menggunakan sistem gugur atau tidak. Jika diterapkan sistem gugur, maka hanya buku yang lolos penilaian komponen utama yang akan dilanjutkan ke tahap penilaian berikutnya. Jika tidak diterapkan sistem gugur, perlu diberikan peluang kepada penerbit untuk memperbaiki dan perlu dilakukan penilaian isi lagi sebelum diikutkan ke tahap berikutnya. Dengan demikian, tahapan penilaian akan lebih lama. Selain itu, penerbit tidak mendapat masukan untuk revisi secara utuh (4 komponen).

Selain itu penilaian buku yang selama ini dilakukan BSNP telah menerapkan dua pola, yaitu penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dengan instrument penilaian yang dikembangkan oleh tim psikometri. Adapun terkait dengan keterlibatan MGMP dalam penyediaan buku, bisa diartikan dalam dua hal, yaitu sebagai penulis atau penilai. BSNP mengusulkan keterlibatan MGMP adalah sebagai penilai, khususnya guru-guru yang telah berpengalaman. Sebab mereka adalah sebagai pengguna buku. Lebih dari itu, ekosistem perbukuan yang memungkinkan pemberian feedback dari pengguna kepada penerbit, penulis, dan kementerian perlu dipertahankan.

Secara khusus, Zainal A. Hasibuan mengusulkan untuk melihat buku-buku yang telah lolos penilaian sebelum ini, yaitu buku kelas IV SD/MI. Dengan cara seperti ini kita

bisa melihat secara obyektif bahwa dengan metode penilaian seperti ini, kita juga bisa mendapatkan buku-buku yang bagus.

Selain itu, tambah Ucok panggilan akrab Zainal, perlu dilihat kembali sistem pembobotan untuk masing-masing komponen. Mekanisme filtering di awal perlu dilakukan. Jika ada penilai yang memberikan nilai sangat jomplang diantara komponen-komponen tersebut, maka perlu diberikan penjelasan dan justifikasi. Asumsinya, masing-masing komponen saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, menurut Ucok, karena buku teks ini mengacu kepada Kurikulum 2013, maka perlu ada 'minimum adjustment' yang diusulkan kepada Balitbang, Ditjen GTK, dan Ditjen Dikdasmen agar ada rambu-rambu yang jelas dalam penggunaan dan pemanfaatan buku teks pelajaran di satuan pendidikan.

Sementara itu, Kiki Yulianti Sekretaris BSNP menuturkan untuk meningkatkan mekanisme penilaian buku ke depan, perlu dijajagi kemungkinan penilaian buku teks pelajaran dilakukan secara daring (online), sebagaimana ujian nasional yang sudah dilaksanakan dengan berbasis komputer.

"Jika dalam pelaksanaan ujian nasional telah dilakukan ujian berbasis komputer, maka penilaian buku teks pelajaran juga memiliki peluang yang kuat untuk dilakukan dengan berbasis komputer", ucapnya seraya menambahkan perlunya dibuat prosedur operasional standar (POS) penilaian buku baik yang dilakukan secara manual maupun dengan berbasis komputer. (BS)



Dr. Awaluddin Tjalla Kepala Puskrbuk (tengah) membahas beberapa hal terkait penilaian buku teks pelajaran bersama anggota BSNP, di tengah-tengah kegiatan penilaian buku Matematika dan PJOK kelas V SD/MI di Bekasi (18-20/5/2017).

“

Perlu
dijajaki
kemung-
kinan me-
kanisme penilaian buku
ke depan dilakukan
secara daring (online),
sebagaimana ujian
nasional yang sudah
dilaksanakan dengan
berbasis komputer.

Kiki Yulianti
Sekretaris BSNP

TELAAH DRAF STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

BSNP LIBATKAN 84 PAKAR DARI AKADEMISI, PRAKTISI, DAN BIROKRASI



Kegiatan penelaahan draf standar isi kelompok agama dan budi pekerti. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari (20-21 Mei 2017) di kantor BSNP dengan melibatkan 14 orang ahli agama dari akademisi, praktisi, dan birokrasi.

BSNP sebagai badan independen yang memiliki kewenangan mengembangkan standar nasional pendidikan melakukan telaah draf standar nasional dengan melibatkan 84 pakar dari akademisi, praktisi, dan birokrasi. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei dan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, tanggal 13-14 Mei 2017 untuk standar isi kelompok MIPA serta IPS dan PPKn. Tahap kedua, tanggal 20-21 Mei 2017 untuk kelompok Agama dan Budi Pekerti serta Bahasa, Seni, dan PJOK. Tahap ketiga, tanggal 27-28 Mei 2017 untuk standar pendidikan kesetaraan dan standar pengelolaan.

Menurut Kiki Yulianti Sekretaris BSNP mengingat ada keterbatasan anggaran, BSNP belum bisa melibatkan banyak pakar dalam kegiatan telaah draf standar. Kegiatan ini melibatkan 14 orang penelaah untuk masing-masing standar.

“Meskipun jumlah penelaah terbatas, namun BSNP dapat menetapkan kriteria penelaah yang benar-benar bisa berkontribusi dalam menelaah draf standar, sehingga BSNP tetap dapat menghasilkan standar yang

bagus”, ucapnya di dalam pleno BSNP seraya menambahkan tim penelaah mewakili unsur akademisi, praktisi, birokrasi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kegiatan penelaahan draf standar isi kelompok agama dan budi pekerti, misalnya, penelaah meliputi enam unsur agama yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Mereka ada yang dari akademisi dan birokrasi di Kementerian Agama.

Keterlibatan Kementerian

Agama dalam menelaah draf standar isi sangat penting sebagaimana disampaikan oleh seorang penelaah dari Kementerian Agama.

“Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, otoritas pengelolaan pendidikan keagamaan ada pada Kemenag. Oleh karena itu, BSNP perlu melibatkan Kemenag dalam pengembangan standar isi”, ucap Suwendi Kepala Seksi Bina Karir dan Profesi Pendidikan Agama Islam Kemenag.

Menanggapi hal tersebut, Bambang Suryadi sebagai koordinator kegiatan menyampaikan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan merupakan kewenangan BSNP dan dalam proses pengembangannya BSNP selalu melibatkan para pemangku kepentingan dari kementerian atau direktorat terkait. Mengingat masalah agama merupakan hal yang sensitif, BSNP menyambut baik usulan dari pihak Kemenag untuk dilakukan penelaahan draf standar, di luar kegiatan yang telah dilakukan BSNP.

“Khusus untuk pengembangan standar isi kelompok agama dan budi pekerti, BSNP akan memberikan draf standar untuk ditelaah oleh pihak Kemenag sebelum dilakukan uji publik pada bulan Agustus 2017”, ucapnya.

Draf standar isi akan diberikan kepada Kemenag untuk ditelaah secara intensif dengan melibatkan sebagian tim ahli, anggota BSNP, dan penelaah yang ditetapkan Kemenag. Sehubungan dengan rencana tersebut, BSNP akan mengirim surat resmi ke Kemenag.

Secara terpisah Kiki Yulianti mengusulkan supaya draf yang dibahas bersama Kemenag tidak hanya draf standar isi Agama Islam, tetapi juga untuk agama yang lain, yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Dengan mekanisme seperti ini, standar sebagai sebuah konsensus dapat dipenuhi. (BS)

“Meskipun jumlah penelaah terbatas, namun BSNP dapat menetapkan kriteria penelaah yang benar-benar bisa berkontribusi dalam menelaah draf standar, sehingga BSNP tetap dapat menghasilkan standar yang bagus.

Kiki Yulianti
Sekretaris BSNP

PENGUATAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN: STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI



Suasana pembahasan draf standar guru SMK di BSNP (24/4/2017). Acara ini dihadiri oleh tim dari Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Ditjen GTK dan anggota BSNP.

Revitalisasi pendidikan menengah kejuruan (PMK) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, perlu didukung dengan keberadaan standar nasional pendidikan yang menggambarkan karakteristik PMK dan dunia kerja. BSNP memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan standar tersebut. Namun, diperlukan harmonisasi, penyelarasan antar standar yang menjadi kewenangan BSNP dan proses sertifikasi profesi yang menjadi kewenangan BSNP, serta pembinaan guru yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Artinya, ekosistem pendidikan nasional mutlak diperlukan.

Demikian beberapa catatan penting dari pembahasan draf standar guru SMK pada hari Rabu (26/4/2017) di ruang rapat BSNP. Turut hadir dalam acara ini adalah anggota BSNP, tim dari Direktorat Pembinaan SMK dan tim dari Direktorat Guru dan

Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kiki Yulianti Sekretaris BSNP menyampaikan bahwa BSNP telah mengirimkan draf standar kompetensi guru SMK ke Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). "Maksud kami menyerahkan draf tersebut ke GTK adalah untuk melakukan penyelarasan antara pemikiran yang ada di BSNP dengan pemikiran di GTK", ucapnya Kiki yang memimpin rapat pleno BSNP seraya menambahkan standar kompetensi guru tersebut merupakan *exit criteria* dari lulusan LPTK dan sebagai *entry criteria* bagi Ditjen GTK.

Sebagai *exit criteria*, tambah Kiki, tugas utama LPTK adalah untuk menghasilkan calon guru yang memenuhi standar tersebut. Sementara, Ditjen GTK, sebagai pemakai akan menjadikan standar tersebut sebagai *entry criteria* dalam perekrutan guru.

Sementara itu Khomsiyah anggota BSNP sekaligus sebagai koordinator pengembangan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK memaparkan proses dan hasil kerja tim ahli pada tahun 2016. Menurutnya, pada tahun 2007 BSNP sudah mengembangkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Namun Permendiknas tersebut, lebih banyak mengatur tentang kompetensi guru adaptif dan normative, belum banyak mengatur tentang kompetensi guru produktif.

Menurut Anas M Adam Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dari Direktorat Jenderal GTK, ada beberapa tantangan yang diperhitungkan dalam pengembangan standar kompetensi guru SMK. Diantaranya adalah adanya



Diantara tantangan yang dihadapi dalam pengembangan standar kompetensi guru SMK adalah adanya tuntutan sertifikasi kompetensi tingkat ASEAN, kualitas LPTK sebagai penghasil guru masih beragam, banyaknya jumlah program keahlian yang ada di SMK mencapai angka 171 program keahlian, dan pengalaman industri yang dimiliki guru masih terbatas.

Anas M. Adam
Direktur Pembinaan
Guru Pendidikan
Menengah

tuntutan sertifikasi kompetensi tingkat ASEAN, kualitas LPTK sebagai penghasil guru masih beragam, banyaknya jumlah program keahlian yang ada di SMK mencapai angka 171 program keahlian, dan pengalaman industri yang dimiliki guru masih terbatas.

“Untuk guru normatif dan adaptif sudah tidak ada masalah, tetapi yang menjadi tantangan kita adalah guru-guru produktif, khususnya untuk empat bidang keahlian yang menjadi prioritas, yaitu industri kreatif (seni pertunjukan, seni rupa dan kriya, dan TIK), maritim, pertanian, dan pariwisata”, ucap Anas.

Lebih lanjut Anas menyapaikan untuk memenuhi kekurangan guru produktif dilakukan empat program unggulan, yaitu program keahlian ganda, program sarjana mengajar, sertifikasi guru melalui profesi guru dalam jabatan, dan formasi guru SMK. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi guru dilakukan pelatihan guru produktif (dalam dan luar negeri, ke Jerman), magang di industri, sertifikasi kompetensi keahlian (di LSP), revitalisasi MGPM.

Bambang Suryadi anggota BSNP melihat pertemuan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan harmonisasi antar lembaga, yaitu BSNP, BNSP, Ditjen GTK, dan Dit PSMK. BSNP dalam pengembangan Standar nasional pendidikan mengacu kepada KKNi, SKKNI, dan standar internasional. BNSP dalam melakukan uji kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) perlu mengacu kepada standar yang telah dikembangkan BSNP. Permasalahannya adalah bagaimana

supaya ada sikap saling menyesuaikan dan saling menguatkan antar standar nasional pendidikan dan uji kompetensi.

Titi Savitri Prihatiningsih anggota BSNP mengatakan momentum ini sangat tepat untuk mengembalikan SMK ke khittahnya, yaitu untuk bekerja di dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, kompetensi lulusan SMK perlu dibedakan dengan kompetensi lulusan SMA.

“SKL SMK sudah ditargetkan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja yang dirumuskan dalam SKKNI”, ucap Titi seraya menambahkan saat ini ada jalur yang terputus antara kompetensi yang ditetapkan BSNP, BNSP, dan instrument uji kompetensi.

Djoko berpandangan bahwa yang perlu ditanggapi adalah kebutuhan dunia kerja di lapangan. Pemenuhan tuntutan dunia kerja ini nampak dari kompetensi keahlian dan SKKNI. Andaikata definisi dan standar kompetensi keahlian sudah benar, maka pada langkah selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Hal ini yang menjadi wilayah kewenangan Ditjen GTK. (BS)

LENSA



Dina Ocampo Wakil Menteri Pendidikan Filipina menyampaikan materi tentang reformasi kurikulum di Filipina dalam acara International Conference on Effective Practices of Curriculum Reform in Asia, tanggal 12 Mei 2017 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (berbaju putih) menyampaikan hasil UN SMA/MA dan SMK dalam acara konferensi pers, Jumat, 12 Mei 2017, di Gedung A Kemdikbud. Turut hadir dalam acara ini (dari kiri ke kanan) adalah Hamid Muhamamd Dirjen Dikdasmen, Nizam Kepala Puspendik, Kiki Yulianti Sekretaris BSNP, Totok Supriyatno Kepala Balitbang, Daryanto Irjen, Harris Iskandar Dirjen PAUD dan DIKMAS, serta Sumarna Surapranata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

BSNP



Tim ACDP, ACER, Kemdikbud dan BSNP berpose bersama setelah pelaksanaan Workshop Penguatan Kurikulum dan Penilaian, 16 Mei 2017 di Jakarta. Salah satu rekomendasi dari workshop ini adalah perlunya dilakukan penyelarasan antara standar nasional pendidikan, kurikulum, dan penilaian.



Siswa SMP IPH Surabaya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada hari kedua dengan materi ujian Matematika. Dalam era digital, penilaian berbasis komputer dianggap lebih efektif dan efisien, dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Pengawasan secara silang antar sekolah tetap dilakukan dalam UNBK untuk menjaga kredibilitas ujian.

LENSA



Siswa SMP Negeri I Malang melakukan belajar kelompok pada hari pertama ujian untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tahun 2017 merupakan pertama kali sekolah ini menerapkan UNBK. SMPN I Malang mendapat predikat Eco Park Green School se-Kota Malang tahun 2016.



Pelaksanaan UN Program Paket C di Lapas Banjarmasin (15/4/2017). Sebanyak 34 peserta ujian mengikuti ujian nasional program paket C. Ada tujuh mata pelajaran yang diujikan untuk Paket C (IPS), yaitu Bahasa Indonesia, Geografi, Matematika, Sosiologi, Bahasa Inggris, Ekonomi, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

BSNP



Peserta didik dari PKBM mengikuti Ujian Nasional Program Paket C dengan UNBK di Banjarmasin (15/4/2017). UNBK dilaksanakan di SMKN 2 Banjarmasin dengan prinsip berbagi sumber (resource sharing). Tahun 2017 merupakan pelaksanaan UNBK pertama kali bagi PKBM.



Anggota BSNP Bambang Suryadi (kedua dari kanan) berpose bersama Kepala SMP IPH Marry Shine (kanan) dan pengurus yayasan Anita (Kiri), se usai memantau pelaksanaan UNBK pada hari kedua. Pada tahun 2017 sebanyak 11.096 sekolah melaksanakan UNBK dan sisanya 45.098 masih melaksanakan UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).

LENSA



Penilaian buku teks pelajaran Matematika dan PJOK kelas V SD/MI dilaksanakan pada tanggal 18-20 Mei 2017 di Bekasi. Ada 48 buku matematika dan 35 buku PJOK yang dinilai dengan melibatkan 52 penerbit, 112 tim penilai dari akademisi (ahli materi), guru, ahli pembelajaran, dan ahli kegrafikaan. Penilaian dilakukan



Suasana diskusi kelompok untuk pembahasan draf standar pendidikan kesetaraan di BSNP (27-28/5/2017). Kegiatan ini melibatkan tim ahli dan penelaah dari unsur akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan bidang pendidikan.

BSNP



Tim ahli pengembangan standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah mendiskusikan masukan dari penelaah di ruang sidang BSNP (27-28/5/2017).



Kerja kelompok tim pengembang dan penelaah untuk standar isi kelompok bahasa, seni, budaya, dan pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan. Kegiatan dilaksanakan di ruang sidang BSNP dengan melibatkan tim ahli dan penelaah dari unsur akademis, praktisi, dan pemangku kepentingan bidang pendidikan.

*Anggota BSNP dan Segenap
Jajarannya Mengucapkan*

SELAMAT IDUL FITRI I SYAWAL 1438 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

*Semoga Allah menerima puasa dan amal ibadah
kita serta menjadikan kita dalam golongan orang
yang bertakwa*

Amin



<http://www.bsnp-indonesia.org>